

2023



RENCANA KERJA TAHUNAN



KAPUAS HU



**DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KAPUAS HULU**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-NYA, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu ini disusun untuk memberikan gambaran komprehensif dengan data yang akurat, lengkap, aktual dan relevan sesuai permasalahan dan kebutuhan yang ada pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Visi dan Misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu.

Mudah-mudahan penyusunan Rencana Kerja ini dapat menggerakkan partisipasi masyarakat, dengan demikian tugas yang di fasilitasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu dibidang pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

Akhirnya kami berharap, semoga Rencana Kerja ini dapat dijadikan bahan dalam penyusunan RKPD Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 guna mendukung tujuan akhir Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu dimasa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.



Putussibau, 10 Oktober 2022

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kapuas Hulu,

MARTHA BANANG, SH.MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19651123 199203 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Landasan Hukum 5

 1.3 Maksud dan Tujuan 6

 1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II EVALUASI HASIL RENJA TAHUN LALU..... 9

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan
 Capaian Renstra Perangkat Daerah 9

 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 19

 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 21

 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 22

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 24

 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional 24

 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja 25

 3.3 Program dan Kegiatan 26

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 32

BAB V PENUTUP 33

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2021 Kabupaten Kapuas Hulu	11
Tabel 2.2	Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu	20
Tabel 2.3	Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Monitoring Evaluasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021	22
Tabel 2.4	Pengukuran Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2021	23
Tabel 2.5	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	24
Tabel 2.6	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu	
Tabel 2.7	Usulan Program Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan tahun 2023 Kabupaten Kapuas Hulu	
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program Perangkat Daerah Tahun 2023 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Kapuas Hulu	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alur Rancangan Renja OPD Kabupaten/ Kota	2
Gamabr 1.2	Bagan Alur Hubungan Perencanaan Dan Penganggaran	3
Gambar 1.3	Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah	4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan (Renja PD) merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam prosesnya, penyusunan rencana kerja perangkat daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Oleh karena itu, penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/ paralel dengan penyusunan rencana kerja perangkat daerah (RKPD) dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting perangkat daerah (PD), evaluasi pelaksanaan kerja perangkat daerah (Renja) tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD).

1.1.1. Pengertian

Rencana Kerja (Renja) suatu OPD adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis OPD tersebut. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan Tahunan yang sifatnya operasional. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana kerja perangkat daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu secara hirarki berpedoman pada perencanaan Pembangunan Daerah yang dimulai dari Rencana Pemabangunan Jangka Pendek (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun, yang dijabarkan dalam rencana Panjang jangka menengah daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 tahun dan rencana kerja perangkat daerah (RKPD) dalam setiap tahunnya. Rencana pembangunan jangka menengah daerah menjadi pedoman dalam pembuatan Rencana Stategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat daerah tiap tahunnya.

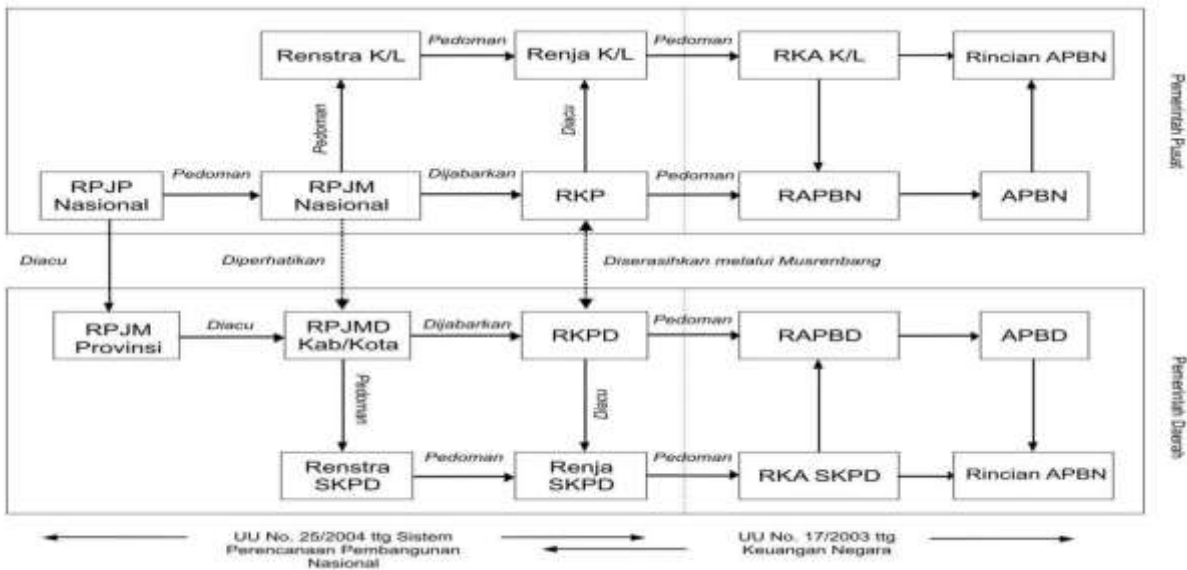
Renja OPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja OPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi Pemerintah terendah dan terkecil. Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang

lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait di tiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.

- c. Tahap Perumusan Rancangan Renja
 - Pengolahan data dan informasi;
 - Analisa gambaran pelayanan OPD;
 - Mereview evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD;
 - Telaah terhadap rancangan awal RKPD;
 - Perumusan tujuan dan sasaran;
 - Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
 - Perumusan kegiatan prioritas;
 - Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD;
 - Penyempurnaan rancangan kerja OPD;
 - Pembahasan forum OPD; dan
 - Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.
- d. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja
- e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan Renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD
- f. Penetapan Renja

Adapun skema hubungan perencanaan dan penganggaran dibawah ini:



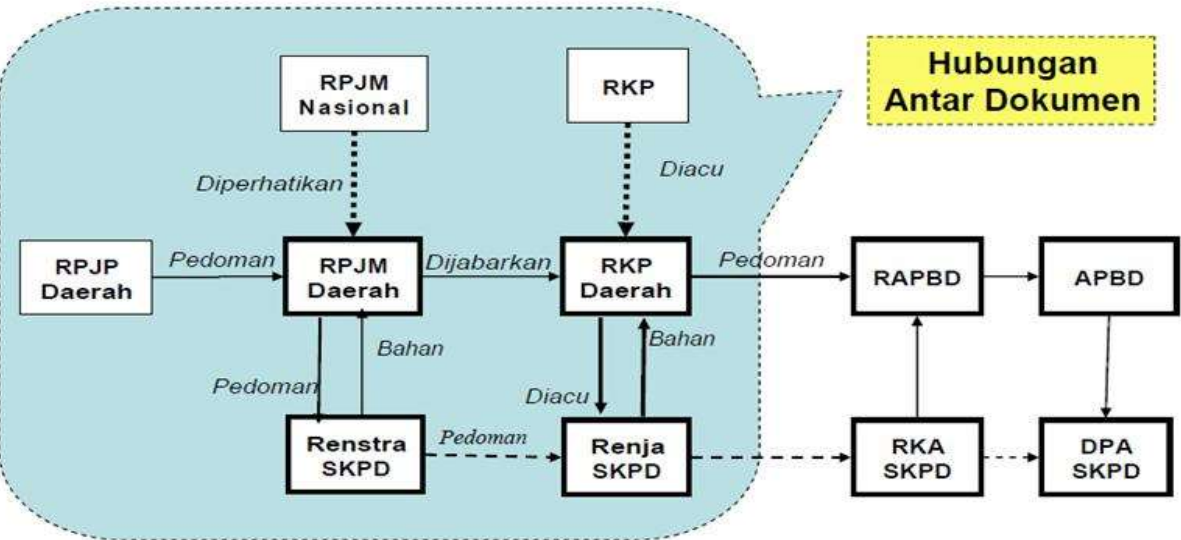
Gambar 1.2 Bagan Alur Hubungan Perencanaan Dan Penganggaran

1.1.3. Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Keterkaitan Renja OPD dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Kapuas Hulu bagian dari penjabaran dan memiliki hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, RKPD, Renstra OPD dan Renja OPD, yang kemudian akan diolah menjadi RKA OPD dan Penjabaran APBD.

Jadi secara garis besar Renja OPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2023 yang memuat berbagai kebijakan dan program prioritas pemberdayaan masyarakat sangat kuat keterkaitan kebijakan umum anggaran, guna mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Secara khusus berfungsi sebagai pedoman dasar bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2023 sekaligus berfungsi secara umum sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat di daerah, bagi segenap pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu maupun seluruh pemangku kepentingan lainnya, guna mewujudkan sasaran dan tujuan secara terarah, terencana, terpadu, efektif, efisien dan berkesinambungan.

Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.3 Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja OPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 ini, dilandaskan pada peraturan perundang-undangan diantaranya:

1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
8. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang 23 tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
10. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Dalam Negeri;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
19. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang standar pelayanan dasar pada standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
20. Peraturan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang akan menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dibuatnya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2023 adalah untuk:

- a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian

kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

- b. Bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

Dokumen awal mekanisme penganggaran sebagai acuan bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu dalam menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2023.

Disamping itu, juga sebagai dasar mengimplementasikan kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang didalam RPJMD 2022-2026 agar terwujudnya kerangka pembangunan daerah yang kokoh, tangguh dan mandiri sebagaimana yang diamanatkan dalam Visi dan Misi yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu 2022-2026.

Tujuan Penyusunan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2023 adalah untuk memetakan kebutuhan berbagai sumber selama 1 (satu) tahun ke depan secara jelas dan transparan yang akan digunakan sebagai acuan/pedoman dalam melaksanakan program Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta mempermudah melaksanakan kegiatan selama 1 (satu) tahun kedepan, sehingga sumber-sumber daya yang ada di masyarakat dapat dikelola secara optimal.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja SKPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2023 disusun dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang Pada Bab ini akan dipaparkan tentang Latar Belakang; Landasan Hukum; Maksud dan Tujuan; serta Sistematika Penulisan.

Bab II : Evaluasi Hasil Renja Tahun Lalu

Berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah; Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah; Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi; Tujuan Sasaran Renja; dan Program Kegiatan.

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Pada Bab ini akan dipaparkan Rencana Kerja dan Pendanaan dalam bentuk program dan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu.

Bab IV : Penutup

Pada Bab ini akan dipaparkan kesimpulan dari pembuatan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023

PBAB II
EVALUASI HASIL RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu.

Hasil Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun 2021 berdasarkan target indikator kinerja program /kegiatan yang memenuhi keluaran yang direncanakan:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
3. Program Pemberdayaan Sosial;
4. Program Rehabilitasi Sosial;
5. Program Penanganan Bencana;
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
7. Program Perlindungan Perempuan;
8. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
9. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
10. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
11. Program Pengendalian Penduduk;
12. Program Pembinaan Keluarga Berencana;
13. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Pada tahun 2021 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat 13 Program dengan anggaran sebesar **Rp.16.943.433.221,00**. Anggaran tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dimana Anggaran DAK sebesar **Rp.6.340.152.000,00** dan APBD sebesar **Rp.10.603.281.221,00**. Adapun Dana DAK tersebut merupakan penunjang pada kegiatan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Realisasi anggaran Tahun 2021 sebesar **Rp.13.104.528.000,00** atau sekitar 77% dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.1 T-C 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021

No	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran PD s/d Akhir Tahun 2021 (akhir tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (%)	
			K	Rp. (000)	K	RP. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase bidang dalam SKPD yang dilayani administrasi perkantoran	100%	4.014.045	100%	3.525.637	100	3.476.491	100	98
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	100%	1.858	100%	1.858	100	1.858	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA	1 dokumen	100%	2.004	100%	2.004	100	2.004	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	100%	2.095	100%	3.599	100	3.599	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15 dokumen	100%	2.158	100%	2.158	100	2.158	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	15 dokumen	100%	1.945	100%	3.661	100	3.661	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	100%	1.950	100%	4.249	100	4.249	100	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	100%	1.881	100%	1.881	100	1.881	100	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	100%	3.054.761	100%	2.576.389	98	2.545.388	98	83
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	100%	255.620	100%	245.205	75	242.685	98	83
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 bulan	100%	1.918	100%	2.935	172	2.935	100	100

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	12 bulan	100%	1.635	100%	3.755	100	3.755	100	100
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 dokumen	100%			1.355	100	1.355	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / semesteran / SKPD	4 dokumen	100%	2.125	100%	2.994	100	2.994	100	141
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 unit	100%	18.350	100%	21.500	94	20.847	94	110
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	100%	7.353	100%	7.353	55	7.213	55	55
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19 orang	100%	105.820	100%	91.783	88	83.395	88	77
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	100%	30.015	100%	30.015	97	29.830	97	97
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150 buah	100%	1.050	100%	4.700	11	4.700	100	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	100%	72.800	100%	61.400	90	55.291	90	76
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 unit	100%	6.100	100%	1.460	98	1.430	98	23
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13 orang	100%	396.641	100%	406.717	100	406.717	100	102
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan	100%	21.983	100%	17.574	88	15.463	88	70
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	100%	23.984	100%	36.076	86	33.301	86	129
2										
	Program Pemberdayaan Sosial		100%	260.276	100%	341.240	17	340.940	17	131
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	2 orang	100%	5.336	100%	5.000	76	3.800	76	71

	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota	23 orang	100%	252.440	100%	335.240	100	335.240	100	133
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	2 kecamatan	100%	2.500	100%	1.000	100	1.000	100	40
3	Program Rehabilitasi Sosial		100%	77.927	100%	65.751	34	63.940	34	83
	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	10 orang	100%	77.927	100%	65.751	98	63.940	98	83
4	Program Perlindungan Jaminan Sosial		100%	3.220.267	100%	4.417.973	91	4.059.241	91	91
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	2 laporan	100%	3.166.558	100%	4.356.609	91	3.998.877	91	126
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	46 orang	100%	53.709	100%	61.364	77	60.364	77	44
5	Program Penanganan Bencana		100%	102.644	100%	88.254	24	86.647	24	84
	Pelayanan Dukungan Psikososial	12 bulan	100%	50.394	100%	25.254	91	23.647	91	46
	Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	35 orang	100%	52.250	100%	63.000	100	63.000	100	121
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		100%	99.576	100%	39.683	11	39.332	11	39
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota	2 TMP	100%	99.576	100%	39.683	99	39.332	99	39
7	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		100%	103.804	100%	61.439	164	48.991	79	47

	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	2 kali	100%	62.681	100%	20.317	89	18.089	89	29
	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG dan PPRG	2 kecamatan	100%	41.123	100%	41.123	75	33.352	75	75
8	Program Perlindungan Perempuan		100%	69.822	100%	50.562	-	35.950	71	51
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Daerah Kab/Kota	2 kecamatan	100%	69.822	100%	50.562	71	35.950	71	51
9	Program Peningkatan Kualitas Keluarga		100%	192.895	100%	192.895	-	184.491-	95	-
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	175 orang	100%	192.895	100%	192.895	87	184.491	95	-
10	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)		100%	58.410	100%	42.769	97	41.292	97	71
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	1 kegiatan	100%	58.410	100%	42.769	97	41.292	97	71
11	Program Pengendalian Penduduk	Persentase PMKS yang mendapat Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial	100%	101.582	100%	73.126	92	67.146	92	66
	Dukungan Pelaksanaan Survei / Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	4 kecamatan	100%	82.747	100%	55.605	97	53.815	97	65
	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	2 kecamatan	100%	18.835	100%	17.521	77	13.481	77	72

12	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)			8.098.611		7.947.761	-	4.594.046	57	57
	Pengelolaan Operasional dan sarana dibalai penyuluhan KKBPK	23 kecamatan	100%	6.340.152	100%	6.340.152	62	3.912.624	62	62
	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	10 paket	100%	1.374.094	100%	1.374.094	37	506.704	37	37
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	50 Akseptor	100%	36.143	100%	14.490	92	13.289	92	37
	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	50 Akseptor	100%	201.229	100%	111.381	98	109.694	98	55
	Pembinaan Terpadu Kampung KB	250 Akseptor	100%	146.994	100%	107.646	48	51.736	48	35
13	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)			98.424		96.323	-	183.672		156
	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	3 kampung KB	100%	80.143	100%	80.035	80	69.054	80	80
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPPKS)	2 kecamatan	100%	18.281	100%	16.288	550	14.618	550	490
	TOTAL		100%	16.498.282	100%	16.943.433	77	13.104.528	77	77

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu

Kajian terhadap capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku instansi yang melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat harus selalu memberikan kinerja yang baik dalam pelayanan. Analisis kinerja pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibuat untuk mendapatkan gambaran bagaimana tingkat kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap masyarakat. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah dibuat dalam bentuk tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2 T-C 30
Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu

NO	INDIKATOR	TARGET			REALISASI CAPAIAN			CATATAN ANALISIS
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Predikat SAKIP	B	B	B	CC	-	-	
2	% Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	78.80%	80%	80%	74.60%	-	-	
3	% Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	-	-	

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel berikut (Tabel 2.3) dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran.

Tabel 2.3
Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Monitoring dan Evaluasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Jenis Data	Formulasi / rumus Perhitungan	Teknik Pengumpulan data	Teknik Monitoring dan Evaluasi
1.	% Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Kualitatif	Capaian Indikator = $\frac{\text{Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani}}{\text{Jumlah PMKS}} \times 100 \%$		
2.	% Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Yang terselesaikan	Kualitatif	Capaian Indikator = $\frac{\text{Jumlah kasus yang diselesaikan}}{\text{Jumlah kasus}} \times 100 \%$		

Pencapaian Indikator Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 ditunjukkan oleh tabel berikut ini.

Tabel 2.4
Pengukuran Kinerja
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Tahun Anggaran 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Realisasi
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Predikat SAKIP	%	B	CC	91.98
2.	Meningkatnya Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	% PMKS	%	78.80	74.60	90.92
3.	Meningkatnya Perlindungan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	% Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Yang terselesaikan	%	100	100	100

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria Baik/ Sangat Tinggi dengan rata capaian sebesar 100%

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Isu-Isu Strategis dan Rencana Kerja 2023 disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Masing-masing tugas dan fungsi ini dijabarkan melalui program dan Kegiatan di Sub Bagian Umum dan Aparatur, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Program, Bidang Sosial, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penyusunan Program dan Kegiatan berdasarkan pada kondisi strategis, isu pokok yang berkembang serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai. Dalam menyusun Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, juga memperhatikan Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) suatu organisasi. Sehingga Renstra mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, Program dan Kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Permasalahan Strategis yang dihadapi dalam pembinaan Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan saat ini antara lain :

- a. Tuntutan Masyarakat terhadap pemerintah terkait pelayanan dibidang Kesejahteraan Sosial sangat tinggi
- b. Belum adanya pemahaman yang sama terkait Pengarusutamaan Gender.
- c. Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan Hak Anak diberbagai bidang pembangunan.
- d. Belum diadakannya materi dan pelaksanaan KIE tentang keselarasan dan keadilan gender.
- e. Belum optimalnya pemahaman peran perempuan dalam pengambilan keputusan.
- f. Belum terlatihnya SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT.
- g. Belum semua mengerti tentang sistem pencatatan dan pelaporan KDRT.
- h. Belum pahamnya organisasi perempuan tentang peran perempuan dalam kesetaraan gender.
- i. Masih rendahnya jumlah bahan informasi tentang pengasuhan tumbuh kembang anak.

Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu untuk 5 (lima) tahun ke depan harus mampu menjawab tantangan dan peluang terkait tugas dan fungsi Dinas. Adapun identifikasi Permasalahan di Bidang Sosial, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang akan dihadapi oleh Dinas Sosial sebagai berikut:

Tabel 2.5
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

ASPEK	KONDISI PENCAPAIAN SAAT INI	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN
		INTERNAL	EKSTERNAL	

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja OPD tahun 2023. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan OPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.6 (lampiran).

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten.

Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan.

Pada Program OPD tidak ada usulan program/ kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku OPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan Kecamatan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan dapat dilihat pada Tabel 2.7 (lampiran).

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penetapan rencana kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu merupakan bentuk pengembangan dari visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya, mencermati visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2022-2026, maka ditetapkan visi Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

” Terwujudnya Kapuas Hulu yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah, dan Terampil ”

Berangkat dari visi tersebut, maka Misi Kabupaten Kapuas Hulu yang ditetapkan adalah :

1. Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu Yang Harmonis dalam Kerukunan Kehidupan Beragama, Budaya dan Keamanan;
2. Mewujudkan Kapuas Hulu yang Kreatif Menuju Desa Mandiri, Pengembangan Aktivitas Ekonomi yang Adil dan Prorakyat, serta Ramah Investasi;
3. Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang Berbudaya, Mandiri, Cerdas dan Inovatif dalam Meningkatkan Kualitas dan Mutu Pendidikan yang Memiliki Daya Saing;
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa dan Tersedianya Infrastruktur Publik yang Berbasis Transparansi, Responsibilitas dan Akuntabilitas;
5. Mewujudkan Kapuas Hulu yang Sejahtera dalam Pelayanan Kesehatan Dasar yang Bermutu bagi Masyarakat.

Dari lima misi tersebut diatas, yang terkait dengan kebijakan pembangunan sektor Kesejahteraan Sosial, Perlindungan Anak dan Perempuan terdapat pada misi ke dua dan misi ke empat. Dari misi tersebut tujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ingin dicapai antara lain adalah:

- a. Persentase Pelayanan PMKS yang tertangani;
- b. Persentase Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang terselesaikan;
- c. Predikat SAKIP.

Sedangkan Sasaran yang akan dicapai pada urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diukur dengan indikator :

- a. Meningkatnya Penanganan dan Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- b. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Anak dan Perempuan.
- c. Meningkatnya Penyelenggaraan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Analisis Renstra K/L dan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

a. Sasaran Strategis urusan Sosial

1. Persentase (%) keluarga miskin dan rentan serta PMKS lainnya yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar;
2. Persentase (%) anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marjinal lainnya yang meningkat kemampuannya dalam pemenuhan hak dasar
3. Persentase (%) SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya;
4. Persentase (%) lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya.

b. Sasaran Strategis urusan PP dan PA

1. Jumlah Kebijakan yang responsif gender dan mendukung pemberdayaan perempuan dengan satuan ukur kebijakan
2. Jumlah lembaga yang yang melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dengan satuan ukur K/L, prov/kab/kota dan organisasi
3. Jumlah kebijakan perlindungan perempuan dengan satuan ukur kebijakan
4. Jumlah lembaga yang yang melaksanakan perlindungan perempuan dengan satuan ukur K/L, prov/kab/kota dan organisasi
5. Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif dengan satuan ukur persentase

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai. Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022-2026 selanjutnya dijabarkan sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

2.5.1. Tujuan

1. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial
2. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak

2.2.2. Sasaran

1. Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial
2. Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan terhadap Anak dan Perempuan

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di tahun 2023 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Menetapkan Sasaran Sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu” diarahkan pada upaya meningkatkan predikat nilai evaluasi SAKIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu secara bertahap, yang mana untuk kepentingan tersebut didukung dengan 5 Program.

Rekapitulasi rencana program dan kegiatan tahun 2023:

Jumlah Program	: 10
Jumlah Kegiatan	: 16
Pagu Indikatif APBD	: Rp.7.693.382.295,00
Pagu Indikatif APBN/TP	: -
Pagu Indikatif APBN/DAK	: -

Rencana Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu.

a. Program Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan :

1). Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah
- b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- e) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
- f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- d) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

- e) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- f) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- g) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

3). Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

4). Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- g) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

5). Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sasaran 2 : Meningkatnya Penanganan dan Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

b. Program Pemberdayaan Sosial

Kegiatan :

1). Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota

- a) Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota

c. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Kegiatan :

1) Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

- a) Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

d. Program Rehabilitasi Sosial

Kegiatan :

1) Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial

- a) Penyediaan Permakanan
- b) Pemberian Layanan Rujukan

e. Program Perlindungan Jaminan Sosial

Kegiatan :

1). Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

- a). Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - BPJS PBI dan Mandiri
- b). Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

f. Program Penanganan Bencana

Kegiatan:

- 1). Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**
 - a) Penyediaan Makanan
- 2). Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiap Siagaan Bencana Kabupaten /Kota**
 - a) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

g. Program Pengelolaan Taman makam Pahlawan

Kegiatan :

- 1). Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**
 - a) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Sasaran 3 : Meningkatnya Pelayanan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak

h. Program Pengarusutamaan gender dan Pemeberdayaan Perempuan

Kegiatan :

- 1). Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota).**
 - a). Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.**

i. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Kegiatan :

- 1). Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
 - a). Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.

j. Program Pemenuhan Hak Anak

Kegiatan :

- 1) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan**

Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota"

- a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- b) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kapuas Hulu namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Rencana Kerja (Renja) yang berisikan Program dan Kegiatan tahun 2023 telah dibuatkan dalam bentuk tabel dan dilengkapi dengan perkiraan maju rencana kerja tahun 2024. (Tabel 4.1)

BAB V

PENUTUP

1.1. Penutup

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu disusun sebagai wujud dukungan Sistem Administrasi Negara yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi pihak-pihak yang dilayani.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu ini adalah sebagai alat umpan balik (Feed back) yang dapat digunakan manajemen dalam rangka memberikan masukan / pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan sekaligus pertanggungjawaban atas keberhasilan / kegagalan pelaksanaan tugas dan penjabaran dari Visi dan Misi SKPD.

Berhasilnya usaha-usaha pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu umumnya dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu khususnya, sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh masyarakat, adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi yang ditunjuk melalui kesungguhan, kejujuran, keterbukaan dalam melaksanakan berbagai bentuk program dan kegiatan yang telah dirumuskan sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sebagai wujud dari peningkatan kesejahteraan.



Putussibau, 10 Oktober 2022

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kapuas Hulu,

MARTNA BANANG, SH.MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19651123 199203 2 006



LAMPIRAN



[DATE]

[COMPANY NAME]

[Company address]

TABEL 2.6
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
DINAS SOSISAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KAPUAS HULU

OPD : DINAS SOSISAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11		12
	A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Kapuas Hulu	A. PREDIKAT SAKIP	B	Rp 4.110.716.637,00		A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Kapuas Hulu	A. PREDIKAT SAKIP	B	Rp 3.213.662.045,00		
	I. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	I. Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Dokumen	Rp 17.930.000,00		I. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	I. Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Dokumen	Rp 16.300.000,00		
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Kab. Kapuas Hulu	1. Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	Rp 1.980.000,00		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Kab. Kapuas Hulu	1. Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	Rp 1.800.000,00		
	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu	2. Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 3.300.000,00		2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu	2. Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 3.000.000,00		
	3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu	3. Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 2.750.000,00		3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu	3. Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 2.500.000,00		
	4. Koordinasidan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu	4. Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 2.750.000,00		4. Koordinasidan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu	4. Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 2.500.000,00		
	5. Koordinasidan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu	5. Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 2.750.000,00		5. Koordinasidan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu	5. Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 2.500.000,00		
	6. Koordinasidan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kapuas Hulu	6. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	1 Dokumen	Rp 2.200.000,00		6. Koordinasidan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kapuas Hulu	6. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	1 Dokumen	Rp 2.000.000,00		
	7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	7. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	Rp 2.200.000,00		7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	7. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	Rp 2.000.000,00		
	II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	II. Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	36 laporan	Rp 2.701.993.587,00		II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	II. Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	36 laporan	Rp 2.482.478.170,00		
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kapuas Hulu	1. Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 laporan	Rp 2.472.297.527,00		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kapuas Hulu	1. Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 laporan	Rp 2.269.663.170,00		
	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kapuas Hulu	2. Jumlah Dokumen Pembayaran Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Per Triwulan	4 laporan	Rp 213.284.060,00		2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kapuas Hulu	2. Jumlah Dokumen Pembayaran Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Per Triwulan	4 laporan	Rp 31.175.000,00		
	3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Kuangan SKPD	Kab. Kapuas Hulu	3. Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian Keuangan SKPD yang di Susun Setiap Bulannya	12 laporan	Rp 2.750.000,00		3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Kuangan SKPD	Kab. Kapuas Hulu	3. Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian Keuangan SKPD yang di Susun Setiap Bulannya	12 laporan	Rp 171.220.000,00		

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	URUTAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kapuas Hulu	4. Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian Keuangan SKPD yang di Susun Setiap Semesteran	2 laporan	Rp 2.750.000,00	4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kapuas Hulu	4. Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian Keuangan SKPD yang di Susun Setiap Semesteran	2 laporan	Rp 2.500.000,00	
	5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kapuas Hulu	5. Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun tepat Waktu	1 laporan	Rp 3.850.000,00	5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kapuas Hulu	5. Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun tepat Waktu	1 laporan	Rp 3.500.000,00	
	6. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Kapuas Hulu	6. Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang disusun	1 laporan	Rp 2.112.000,00	6. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Kapuas Hulu	6. Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang disusun	1 laporan	Rp 1.920.000,00	
	7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Kapuas Hulu	7. Jumlah Laporan keuangan Bulanan / Triwulan/ Semesteran SKPD yang disusun setiap Bulannya	4 laporan	Rp 2.750.000,00	7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Kapuas Hulu	7. Jumlah Laporan keuangan Bulanan / Triwulan/ Semesteran SKPD yang disusun setiap Bulannya	4 laporan	Rp 2.500.000,00	
	8. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kapuas Hulu	8. Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 laporan	Rp 2.200.000,00	8. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kapuas Hulu	8. Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 laporan	Rp -	
	III Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	III Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14 Dokumen	Rp 13.636.700,00	III Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	III Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14 Dokumen	Rp -	
	1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kapuas Hulu	1. Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Derah SKPD	1 Dokumen	Rp 1.642.300,00	1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kapuas Hulu	1. RKBMD	1 Dokumen	Rp -	
	2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kapuas Hulu	2. Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Rp 1.607.100,00	2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kapuas Hulu	2. KODEFIKASI / REGISTER BMD	2 Dokumen	Rp -	
	3. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kapuas Hulu	3. Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	3 Dokumen	Rp 1.728.100,00	3. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kapuas Hulu	3. SK TIM PENGHAPUSAN BMD, DAFTAR PENGHAPUSAN BMD, LAPORAN PENGHAPUASAN BMD	3 Dokumen	Rp -	
	4. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kapuas Hulu	4. Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Dokumen	Rp 4.845.500,00	4. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kapuas Hulu	4. Daftar Penunjukan Penggunaan BMD , Laporan Monev per-semester	5 Dokumen	Rp -	
	5. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kapuas Hulu	5. Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Dokumen	Rp 1.723.700,00	5. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kapuas Hulu	5. BA REKONSILIASI BMD semester I dan semester 2	2 Dokumen	Rp -	
	6. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kapuas Hulu	6. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daersh pada SKPD	1 Dokumen	Rp 2.090.000,00	6. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kapuas Hulu	6. INVENTARISASI BMD (KIR/ KIB)	1 Dokumen	Rp -	
	IV Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	IV Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17 Dokumen	Rp 86.264.200,00	IV Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	IV Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17 Dokumen	Rp 31.959.000,00	
	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Kapuas Hulu	1. 1) PERKA KODE ETIK PEGAWAI 2 Maklumat Penegakan Disiplin ASN/ Malu datang Terlambat, 3) SK Agen Perubahan 4) Rencana Kerja Agen Perubahan 5)SK TIM GRATIFIKASI	2 Dokumen	Rp 1.144.000,00	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Kapuas Hulu	1. 1) PERKA KODE ETIK PEGAWAI 2 Maklumat Penegakan Disiplin ASN/ Malu datang Terlambat, 3) SK Agen Perubahan 4) Rencana Kerja Agen Perubahan 5)SK TIM GRATIFIKASI	2 Dokumen	Rp -	
	2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kapuas Hulu	2. 1SPK 2 BAST	1 Dokumen	Rp 38.500.000,00	2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kapuas Hulu	2. 1SPK 2 BAST	1 Dokumen	Rp 31.959.000,00	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	STATUS PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kapuas Hulu	3. 1 ANJAB +ABK 2 Daftar kebutuhan pegawai pada 3 DUK 4.Daftar Kenaikan Pangkat 5 Daftar Kenaikan gaji berkala 6. SKUM	5 Dokumen	Rp 11.000.000,00	3. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kapuas Hulu	3. 1 ANJAB +ABK 2 Daftar kebutuhan pegawai pada 3 DUK 4.Daftar Kenaikan Pangkat 5 Daftar Kenaikan gaji berkala 6. SKUM	5 Dokumen	Rp -	
	4. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kapuas Hulu	4. 1 Laporan Movev Sistem Informasi kepegawaian dari Aplikasi MySAPK BKN 2.LHKPN/LHKASN	1 Dokumen	Rp 2.750.000,00	4. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kapuas Hulu	4. 1 Laporan Movev Sistem Informasi kepegawaian dari Aplikasi MySAPK BKN 2.LHKPN/LHKASN	1 Dokumen	Rp -	
	5. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kapuas Hulu	5. 1 Perencanaan SKP 2 SKP Bulanan 3 SKP Tahunan 4 SK Pegawai Terbaik 5 Absensi Manual/ digital 6 Laporan Movev Disiplin ASN	6 Dokumen	Rp 1.100.000,00	5. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kapuas Hulu	5. 1 Perencanaan SKP 2 SKP Bulanan 3 SKP Tahunan 4 SK Pegawai Terbaik 5 Absensi Manual/ digital 6 Laporan Movev Disiplin ASN	6 Dokumen	Rp -	
	6. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kapuas Hulu	6. 1Daftar kebutuhan Diklat Aparatur 2Laporan Pelaksanaan Diklat/ SertifikaT Diklat Aparatur B	2 Dokumen	Rp 31.770.200,00	6. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kapuas Hulu	6. 1Daftar kebutuhan Diklat Aparatur 2Laporan Pelaksanaan Diklat/ SertifikaT Diklat Aparatur B	2 Dokumen	Rp -	
	V Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	V Jumlah Dokumen administrasi Umum	19 Dokumen	Rp 306.418.530,00	V Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	V Jumlah Dokumen administrasi Umum	19 Dokumen	Rp 206.661.375,00	
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kapuas Hulu	1. 1.Daftar Kebutuhan komponen listrik/ penerangan 2.Laporan Penggunaan komponen Listrik	2 Dokumen	Rp 2.070.200,00	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kapuas Hulu	1. 1.Daftar Kebutuhan komponen listrik/ penerangan 2.Laporan Penggunaan komponen Listrik	2 Dokumen	Rp 2.060.000,00	
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kapuas Hulu	2. 1.Daftar kebutuhan alat dan perlengkapan kantor tahun yad 2.Kontrak Pengadaan Barang/Jasa + Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 3. Laporan Pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Dokumen	Rp 16.208.500,00	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kapuas Hulu	2. 1.Daftar kebutuhan alat dan perlengkapan kantor tahun yad 2.Kontrak Pengadaan Barang/Jasa + Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 3. Laporan Pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Dokumen	Rp 32.227.375,00	
	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Kapuas Hulu	3. 1Daftar kebutuhan Peralatan rumah tangga 2. Laporan Pelaksanaan Penyediaan Peralatan rumah tangga	1 Dokumen	Rp 16.500.000,00	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Kapuas Hulu	3. 1Daftar kebutuhan Peralatan rumah tangga 2. Laporan Pelaksanaan Penyediaan Peralatan rumah tangga	1 Dokumen	Rp 7.272.000,00	
	4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kapuas Hulu	4. 1.Daftar Kebutuhan ATK dan makanan dan minuman; 2. Laporan Pelaksanaan penyediaan logistik	0 Dokumen	Rp 44.000.000,00	4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kapuas Hulu	4. 1.Daftar Kebutuhan ATK dan makanan dan minuman; 2. Laporan Pelaksanaan penyediaan logistik	0 Dokumen	Rp 23.440.000,00	
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kapuas Hulu	5. 1 Daftar kebutuhan barang cetakan / penggandaan 2 Laporan penyediaan barang cetakan	2 Dokumen	Rp 22.077.880,00	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kapuas Hulu	5. 1 Daftar kebutuhan barang cetakan / penggandaan 2 Laporan penyediaan barang cetakan	2 Dokumen	Rp 22.875.000,00	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	STATUS PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kapuas Hulu	6. 1 daftar kebutuhan buku-buku/ bahan bacaan 2 Laporan penyediaan buku-buku/ bahan bacaan	2 Dokumen	Rp 13.200.000,00	6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kapuas Hulu	6. 1 daftar kebutuhan buku-buku/ bahan bacaan 2 Laporan penyediaan buku-buku/ bahan bacaan	2 Dokumen	Rp -	
7	Penyediaan Bahan/ Material	Kab. Kapuas Hulu	7 1 Daftar kebutuhan bahan / material 2 Laporan penggunaan bahan Material	2 Dokumen	Rp 16.280.000,00	7 Penyediaan Bahan/ Material	Kab. Kapuas Hulu	7 1 Daftar kebutuhan bahan / material 2 Laporan penggunaan bahan Material	2 Dokumen	Rp -	
8.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kapuas Hulu	8. 1 Daftar Tamu yang difasilitasi	1 Dokumen	Rp 4.180.000,00	8. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kapuas Hulu	8. 1 Daftar Tamu yang difasilitasi	1 Dokumen	Rp -	
9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kapuas Hulu	9. 1 Daftar Rapat SKPD 2 Daftar Perjalanan Dinas	2 Dokumen	Rp 126.143.600,00	9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kapuas Hulu	9. 1 Daftar Rapat SKPD 2 Daftar Perjalanan Dinas	2 Dokumen	Rp 114.587.000,00	
10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kapuas Hulu	10. 1 Daftar Surat Keluar/ 2 masuk	2 Dokumen	Rp 35.103.750,00	10. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kapuas Hulu	10. 1 Daftar Surat Keluar/ 2 masuk	2 Dokumen	Rp 4.200.000,00	
11.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kapuas Hulu	11. 1Daftar kebutuhan Peningkatan Jaringan Internet 2Aplikasi SPBE 3.Hosting Website / 4 Pengelolaan data dan informasi pembangunan perangkat daerah.	2 Dokumen	Rp 10.654.600,00	11. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kapuas Hulu	11. 1Daftar kebutuhan Peningkatan Jaringan Internet 2Aplikasi SPBE 3.Hosting Website / 4 Pengelolaan data dan informasi pembangunan perangkat daerah.	2 Dokumen	Rp -	
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kapuas Hulu	VI Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Dokumen	Rp 200.000.000,00	VI Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kapuas Hulu	VI Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Dokumen	Rp -	
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kapuas Hulu	1. 1SPK 2 BAST	2 Buah	Rp 200.000.000,00	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kapuas Hulu	1. 1SPK 2 BAST	2 Buah	Rp -	
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kapuas Hulu	VII Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25 Dokumen	Rp 518.863.620,00	VII Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kapuas Hulu	VII Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25 Dokumen	Rp 458.486.000,00	
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kapuas Hulu	1. Jumlah materai	200 Buah	Rp 5.940.000,00	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kapuas Hulu	1. Jumlah materai	200 Buah	Rp 5.939.800,00	
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kapuas Hulu	2. 1 Daftar penggunaan telepon 2 daftar penggunaan Air ledeng 3 daftar penggunaan daya listrik 4 internet	4 Dokumen	Rp 78.799.600,00	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kapuas Hulu	2. 1 Daftar penggunaan telepon 2 daftar penggunaan Air ledeng 3 daftar penggunaan daya listrik 4 internet	4 Dokumen	Rp 69.036.000,00	
3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kapuas Hulu	3. Jumlah Peralatan kantor yang di pelihara	20 Dokumen	Rp 4.565.000,00	3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kapuas Hulu	3. Jumlah Peralatan kantor yang di pelihara	20 Dokumen	Rp 4.630.000,00	
4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kapuas Hulu	4. 1 Laporan Evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai non ASN	1 Dokumen	Rp 429.559.020,00	4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kapuas Hulu	4. 1 Laporan Evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai non ASN	1 Dokumen	Rp 378.880.200,00	
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kapuas Hulu	VIII Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8 Dokumen	Rp 265.610.000,00	VIII Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kapuas Hulu	VIII Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8 Dokumen	Rp 17.777.500,00	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	URUTAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kapuas Hulu	1. 1 Daftar kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas 2.Laporan pemeliharaan kendaraan dinas	2 Dokumen	Rp 9.900.000,00	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kapuas Hulu	1. 1 Daftar kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas 2.Laporan pemeliharaan kendaraan dinas	2 Dokumen	Rp 10.624.000,00	
	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kapuas Hulu	2. 1 Daftar kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas 2.Laporan pemeliharaan kendaraan dinas	2 Dokumen	Rp 5.984.000,00	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kapuas Hulu	2. 1 Daftar kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas 2.Laporan pemeliharaan kendaraan dinas	2 Dokumen	Rp 7.153.500,00	
	3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kapuas Hulu	3. 1Daftar kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin 2Laporan pemeliharaan peralatan dan mesin	2 Dokumen	Rp 26.675.000,00	3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kapuas Hulu	3. 1Daftar kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin 2Laporan pemeliharaan peralatan dan mesin	2 Dokumen	Rp -	
	4. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kapuas Hulu	4. 1Daftar kebutuhan Pemeliharaan gedung kantor 2Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa 3Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 4.LAPORAN PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR	2 Dokumen	Rp 223.051.000,00	4. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kapuas Hulu	4. 1Daftar kebutuhan Pemeliharaan gedung kantor 2Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa 3Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 4.LAPORAN PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR	2 Dokumen	Rp -	
	B. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kab. Kapuas Hulu	C. Persentase Penanganan dan Pelayanan PMKS	80 %	Rp 204.160.000,00	B. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kab. Kapuas Hulu	C. Persentase Penanganan dan Pelayanan PMKS	80 %	Rp 189.697.000,00	
	IX Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Kapuas Hulu	IX persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang difasilitasi	100 %	Rp 204.160.000,00	IX Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Kapuas Hulu	IX persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang difasilitasi	100 %	Rp 189.697.000,00	
	1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	1. Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang di Fasilitasi	4 Kegiatan	Rp 11.000.000,00	1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	1. Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang di Fasilitasi	4 Kegiatan	Rp 23.200.000,00	
	2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	2. Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kab/Kota	35 Orang	Rp 182.160.000,00	2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	2. Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kab/Kota	35 Orang	Rp 166.497.000,00	
	3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	3. Jumlah Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat yang terfasilitasi	11 Kegiatan	Rp 11.000.000,00	3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	3. Jumlah Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat yang terfasilitasi	11 Kegiatan	Rp -	
	C. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Kab. Kapuas Hulu	C. Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang dilakukan pemulangan	60 %	Rp 27.500.000,00	C. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Kab. Kapuas Hulu	C. Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang dilakukan pemulangan	60 %	Rp 5.229.250,00	
	X Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kab. Kapuas Hulu	X Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	50 orang	Rp 27.500.000,00	X Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kab. Kapuas Hulu	X Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	2 orang	Rp 5.229.250,00	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	SAKUP PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kab. Kapuas Hulu	1. Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	50 orang	Rp 27.500.000,00	1. Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kab. Kapuas Hulu	1. Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	2 orang	Rp 5.229.250,00	
	D. PROGRAM REHABILITAS SOSIAL	Kab. Kapuas Hulu	D. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dapat diberikan pelayanan	80%	Rp 3.652.000.000,00	D. PROGRAM REHABILITAS SOSIAL	Kab. Kapuas Hulu	D. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dapat diberikan pelayanan	80%	Rp 43.388.000,00	
	XI Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab. Kapuas Hulu	XI Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang direhabilitasi	35 orang	Rp 132.000.000,00	XI Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab. Kapuas Hulu	XI Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang direhabilitasi	35 orang	Rp -	
	1. Penyediaan Permakanan	Kab. Kapuas Hulu	1. Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kab/Kota	35 orang	Rp 82.500.000,00	1. Penyediaan Permakanan	Kab. Kapuas Hulu	1. Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kab/Kota	35 orang		
	2. Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Kapuas Hulu	2. Jumlah yang dirujuk	35 orang	Rp 49.500.000,00	2. Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Kapuas Hulu	2. Jumlah yang dirujuk	35 orang	Rp -	
	XII Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Kab. Kapuas Hulu	XII Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang direhabilitasi	50	Rp 3.520.000.000,00	XII Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Kab. Kapuas Hulu	XII Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang direhabilitasi	50	Rp 43.388.000,00	
	1. Penyediaan Permakanan	Kab. Kapuas Hulu	1. Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kab/Kota	35 orang	Rp 330.000.000,00	1. Penyediaan Permakanan	Kab. Kapuas Hulu	1. Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kab/Kota	5 orang	Rp 3.388.000,00	
	2 Penyediaan Sandang	Kab. Kapuas Hulu	2 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kab/Kota	100 paket	Rp 330.000.000,00	2 Penyediaan Sandang	Kab. Kapuas Hulu	2 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kab/Kota	100 paket	Rp -	
	3 Penyediaan Alat Bantu	Kab. Kapuas Hulu	3 Jumlah Alat Bantu	350 paket	Rp 1.925.000.000,00	3 Penyediaan Alat Bantu	Kab. Kapuas Hulu	3 Jumlah Alat Bantu	350 paket	Rp -	
	4 Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Luar Panti	Kab. Kapuas Hulu	4 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kab/Kota	15 Kegiatan	Rp 110.000.000,00	4 Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Luar Panti	Kab. Kapuas Hulu	4 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kab/Kota	15 Kegiatan	Rp -	
	5 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Kab. Kapuas Hulu	5 Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kab/Kota	10 kegiatan	Rp 330.000.000,00	5 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Kab. Kapuas Hulu	5 Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kab/Kota	10 kegiatan	Rp -	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Kapuas Hulu	6 Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kab/Kota	35 orang	Rp 330.000.000,00	6	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Kapuas Hulu	6 Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kab/Kota	10 orang	Rp 40.000.000,00	
7	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	7 jumlah dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kab/Kota	1 dokumen	Rp 165.000.000,00	7	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	7 jumlah dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kab/Kota	1 dokumen	Rp -	
E. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Kab. Kapuas Hulu	B. Persentase Keluarga Penerima Manfaat	100%	Rp 4.566.795.112,00	E. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kab. Kapuas Hulu	B. Persentase Keluarga Penerima Manfaat	100%	Rp 4.044.584.000,00		
XIII Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Kapuas Hulu	XIII Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin	2 Dokumen	Rp 4.566.795.112,00	XIII Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	XIII Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin	2 Dokumen	Rp 4.044.584.000,00		
1.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - BPJS PBI dan Mandiri	Kab. Kapuas Hulu	1. Jumlah Laporan Verifikasi dan Validasi Data Fakir Miskin/Orang Terlantar	4 Laporan	Rp 4.479.015.112,00	1.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - BPJS PBI dan Mandiri	Kab. Kapuas Hulu	1. Jumlah Laporan Verifikasi dan Validasi Data Fakir Miskin/Orang Terlantar	4 Laporan	Rp 3.967.247.000,00	
2.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Kapuas Hulu	2. Jumlah Laporan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	2 Laporan	Rp 87.780.000,00	2.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Kapuas Hulu	2. Jumlah Laporan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	2 Laporan	Rp 77.337.000,00	
F. PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Kab. Kapuas Hulu	F. Persentase Korban bencana alam/ sosial yang dapat diberikan pelayanan	80 %	Rp 279.262.500,00	F. PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kab. Kapuas Hulu	F. Persentase Korban bencana alam/ sosial yang dapat diberikan pelayanan	80 %	Rp 85.663.000,00		
XIV Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Kab. Kapuas Hulu	XIV Jumlah dokumen Korban Bencana Alam dan Sosial yang ditangani	2 Dokumen	Rp 186.862.500,00	XIV Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	XIV Jumlah dokumen Korban Bencana Alam dan Sosial yang ditangani	1 Dokumen	Rp 19.363.000,00		
1.	Penyediaan Makanan	Kab. Kapuas Hulu	1. Jumlah Orang yang mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kab/Kota	30 kk	Rp 66.000.000,00	1.	Penyediaan Makanan	Kab. Kapuas Hulu	1. Jumlah Orang yang mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kab/Kota	10 kk	Rp 19.363.000,00	
2	Penyediaan Sandang	Kab. Kapuas Hulu	2 Jumlah sandang	125 paket	Rp 110.000.000,00	2	Penyediaan Sandang	Kab. Kapuas Hulu	2 Jumlah sandang	125 paket	Rp -	
3	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Kapuas Hulu	3 Jumlah Korban bencana alam/ sosial yang di rehabilitasi	20 orang	Rp 10.862.500,00	3	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Kapuas Hulu	3 Jumlah Korban bencana alam/ sosial yang di rehabilitasi	20 orang	Rp -	
XV Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiap Siagaan Bencana Kabupaten /Kota		Kab. Kapuas Hulu	XV Jumlah dokumen Korban Bencana Alam dan Sosial yang ditangani	2 Dokumen	Rp 92.400.000,00	XV Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiap Siagaan Bencana Kabupaten /Kota	Kab. Kapuas Hulu	XV Jumlah dokumen Korban Bencana Alam dan Sosial yang ditangani	2 Dokumen	Rp 66.300.000,00		
1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kab. Kapuas Hulu	1 Jumlah Dokumen pembentukan Kampung Siaga Bencana	4 Desa	Rp 33.000.000,00	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kab. Kapuas Hulu	1 Jumlah Dokumen pembentukan Kampung Siaga Bencana	4 Desa	Rp -	
2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Kapuas Hulu	2 Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kab/Kota	35 orang	Rp 92.400.000,00	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Kapuas Hulu	2 Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kab/Kota	35 orang	Rp 66.300.000,00	
G. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Kab. Kapuas Hulu	G. Persentase jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota yang dilakukan pemeliharaan	100 %	Rp 157.300.000,00	G. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Kab. Kapuas Hulu	G. Persentase jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota yang dilakukan pemeliharaan	100 %	Rp 28.680.000,00		
XVI Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Kab. Kapuas Hulu	XVI jumlah Taman Makam Pahlawan yang dilakukan pemeliharaan	2 Kegiatan	Rp 157.300.000,00	XVI Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	XVI jumlah Taman Makam Pahlawan yang dilakukan pemeliharaan	2 Kegiatan	Rp 28.680.000,00		

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	STATUS PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	1. Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional yang dilakukan Pemeliharaan	2 Kegiatan	Rp 121.000.000,00	1. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	1. Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional yang dilakukan Pemeliharaan	2 Kegiatan	Rp -	
	2 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	2 Jumlah Kegiatan Taman Makam Pahlawan yang dilakukan Pemeliharaan	2 Kegiatan	Rp 36.300.000,00	2 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	2 Jumlah Kegiatan Taman Makam Pahlawan yang dilakukan Pemeliharaan	2 Kegiatan	Rp 28.680.000,00	
	H. PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kab. Kapuas Hulu	H. persentase Partisipasi perempuan dilembaga pemerintah	2,51 %	Rp 140.800.000,00	H. PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kab. Kapuas Hulu	H. persentase Partisipasi perempuan dilembaga pemerintah	2,51 %	Rp 8.479.000,00	
	XVII Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	XVII Jumlah Dokumen sosialisasi PUG	1 Dokumen	Rp 66.000.000,00	XVII Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	XVII Jumlah Dokumen sosialisasi PUG	1 Dokumen	Rp -	
	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kab. Kapuas Hulu	1 Jumlah Dokumen sosialisasi PUG	1 Dokumen	Rp 66.000.000,00	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kab. Kapuas Hulu	1 Jumlah Dokumen sosialisasi PUG	1 Dokumen	Rp -	
	XVIII Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	XVIII Jumlah orang yang difasilitasi	2 orang	Rp 8.800.000,00	XVIII Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	XVIII Jumlah orang yang difasilitasi	2 orang	Rp 8.479.000,00	
	1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan PerempuanKewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	1 Jumlah orang yang difasilitasi	2 orang	Rp 8.800.000,00	1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan PerempuanKewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	1 Jumlah orang yang difasilitasi	2 orang	Rp 8.479.000,00	
	XIX Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	XIX Jumlah Dokumen sosialisasi	2 Dokumen	Rp 66.000.000,00	XIX Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	XIX Jumlah Dokumen sosialisasi	2 Dokumen	Rp -	
	1 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Kapuas Hulu	1 Jumlah Dokumen sosialisasi	2 Dokumen	Rp 66.000.000,00	1 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Kapuas Hulu	1 Jumlah Dokumen sosialisasi	2 Dokumen	Rp -	
	I. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kab. Kapuas Hulu	I. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100 %	Rp 132.000.000,00	I. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kab. Kapuas Hulu	I. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100 %	Rp -	
	XX Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	XX Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Rp 122.000.000,00	XX Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	XX Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Rp -	
	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan erhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	1 Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Rp 12.000.000,00	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan erhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	1 Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Rp -	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	2 Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Rp 110.000.000,00	2 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	2 Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Rp -	
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	XXI Jumlah Dokumen Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	1 Dokumen	Rp 10.000.000,00	XXI Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	XXI Jumlah Dokumen Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	1 Dokumen	Rp -	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	1 Jumlah Dokumen Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	1 Dokumen	Rp 10.000.000,00	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	1 Jumlah Dokumen Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	1 Dokumen	Rp -	
J.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Kab. Kapuas Hulu	J. PersentasePerempuan yang mendapat pelatihan	100 %	Rp 45.100.000,00	J. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Kab. Kapuas Hulu	J. PersentasePerempuan yang mendapat pelatihan	100 %	Rp 21.320.500,00	
	XXII Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	XXII Jumlah Kecamatan yang ikut pelatihan	1 Kecamatan	Rp 45.100.000,00	XXII Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	XXII Jumlah Kecamatan yang ikut pelatihan	1 Kecamatan	Rp 21.320.500,00	
	1 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	1 Jumlah Kecamatan yang ikut pelatihan	1 Kecamatan	Rp 45.100.000,00	1 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	1 Jumlah Kecamatan yang ikut pelatihan	1 Kecamatan	Rp 21.320.500,00	
K.	PROGRAM PEEMENUHAN HAK ANAK	Kab. Kapuas Hulu	K. Nilai capaian Kabupaten Layak Anak (pratama, madya, nindya, utama, KLA)	150	Rp 210.551.000,00	K. PROGRAM PEEMENUHAN HAK ANAK	Kab. Kapuas Hulu	K. Nilai capaian Kabupaten Layak Anak (pratama, madya, nindya, utama, KLA)	150	Rp 52.679.500,00	
	XXIII Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	XXIII Jumlah dokumen	1 Dokumen	Rp 64.251.000,00	XXIII Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	XXIII Jumlah dokumen	1 Dokumen	Rp -	
	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	1 Jumlah dokumen Pendukung KLA	1 Dokumen	Rp 64.251.000,00	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	1 Jumlah dokumen Pendukung KLA	1 Dokumen	Rp -	
	XXIII Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	XXIII Jumlah dokumen	1 Dokumen	Rp 146.300.000,00	XXIII Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	XXIII Jumlah dokumen	1 Dokumen	Rp 52.679.500,00	
	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	2 Jumlah Dokumen Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat(PATBM)	1 Dokumen	Rp 110.000.000,00	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	2 Jumlah Dokumen Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat(PATBM)	1 Dokumen	Rp 27.735.500,00	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	URUTAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	3 Jumlah Dokumen forum Anak Daerah FAD)	1 Dokumen	Rp 36.300.000,00	2 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	3 Jumlah Dokumen forum Anak Daerah FAD)	1 Dokumen	Rp 24.944.000,00	
L.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kab. Kapuas Hulu	L. Persentase kasus anak korban kekerasan yang tertangani	13 %	Rp 22.000.000,00	L. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kab. Kapuas Hulu	L. Persentase kasus anak korban kekerasan yang tertangani	13 %	Rp -	
XXIV	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	XXIV Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	1 Dokumen	Rp 22.000.000,00	XXIV Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	XXIV Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	1 Dokumen	Rp -	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	1 Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	1 Dokumen	Rp 22.000.000,00	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	1 Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	1 Dokumen	Rp -	
JUMLAH					Rp 13.548.185.249,00					Rp 7.693.382.295,00	

KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KAPUAS HULU



MARTHA BANANG, S.H.M.M
NIP. 19651123 199203 2 006

TABEL 2.7

USULAN PROGRAM KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023 KABUPATEN KAPUAS

NO	Program dan Kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Volume	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6
A	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Penanganan dan Pelayanan PMKS	Kab. Kapuas Hulu	189.697.000	APBD II
	Keg.Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang difasilitasi	Kab. Kapuas Hulu	189.697.000	APBD II
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang di Fasilitasi	Kab. Kapuas Hulu	23.200.000	APBD II
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kab/Kota	Kab. Kapuas Hulu	166.497.000	APBD II
B	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang dilakukan pemulangan	Kab. Kapuas Hulu	5.229.250	APBD II
	Keg. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kab. Kapuas Hulu	5.229.250	APBD II
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kab. Kapuas Hulu	5.229.250	APBD II
C	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dapat diberikan pelayanan	Kab. Kapuas Hulu	43.388.000	APBD II
	Keg. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang direhabilitasi	Kab. Kapuas Hulu	4.400.000	APBD II
	Penyediaan Permakanan	Jumlah orang perhari	Kab. Kapuas Hulu	3.388.000	APBD II
	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah rujukan	Kab. Kapuas Hulu	40.000.000	APBD II
D	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga Penerima Manfaat	Kab. Kapuas Hulu	4.044.584.000	APBD II
	Keg.Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin	Kab. Kapuas Hulu	4.044.584.000	APBD II
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin	Kab. Kapuas Hulu	3.967.247.000	APBD II

NO	Program dan Kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Volume	Sumber Dana
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Kapuas Hulu	77.337.000	APBD II
E	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban bencana alam/ sosial yang dapat diberikan pelayanan	Kab. Kapuas Hulu	85.663.000	APBD II
	Keg. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Korban Bencana Alam dan Sosial yang ditangani	Kab. Kapuas Hulu	19.363.000	APBD II
	Penyediaan Makanan	Jumlah orang perhari	Kab. Kapuas Hulu	19.363.000	APBD II
	Keg. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiap Siagaan Bencana Kabupaten /Kota	Jumlah dokumen Korban Bencana Alam dan Sosial yang ditangani	Kab. Kapuas Hulu	66.300.000	APBD II
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Taruna Siaga Bencana difasilitasi	Kab. Kapuas Hulu	66.300.000	APBD II
F	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota yang dilaku	Kab. Kapuas Hulu	28.680.000	APBD II
	Keg. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	jumlah Taman Makam Pahlawan yang dilakukan pemeliharaan	Kab. Kapuas Hulu	28.680.000	APBD II
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	jumlah Taman Makam Pahlawan yang dilakukan pemeliharaan	Kab. Kapuas Hulu	28.680.000	APBD II
G	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	persentase Partisipasi perempuan dilembaga pemerintah	Kab. Kapuas Hulu	8.479.000	APBD II
	Keg. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang difasilitasi	Kab. Kapuas Hulu	8.479.000	APBD II
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan PerempuanKewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang difasilitasi	Kab. Kapuas Hulu	8.479.000	APBD II
H	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	PersentasePerempuan yang mendapat pelatihan	Kab. Kapuas Hulu	21.320.500	APBD II
	Keg. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang ikut pelatihan	Kab. Kapuas Hulu	21.320.500	APBD II
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang ikut pelatihan	Kab. Kapuas Hulu	21.320.500	APBD II
I	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Nilai capaian Kabupaten Layak Anak (pratama, madya, nindya, utama, KLA)	Kab. Kapuas Hulu	52.679.500	APBD II

NO	Program dan Kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Volume	Sumber Dana
	Keg. Kenguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat(PATBM)	Kab. Kapuas Hulu	52.679.500	APBD II
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat(PATBM)	Kab. Kapuas Hulu	27.735.500	APBD II
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen forum Anak Daerah FAD)	Kab. Kapuas Hulu	24.944.000	APBD II
J	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah dari Inkab	Kab. Kapuas Hulu	3.213.662.045	APBD II
	Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	16.300.000	APBD II
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.RENSTRA 2.RENJA 3.Perubahan RENJA 4. IKU 5. IKI 6. Peta Proses Bisnis 7. SOP 8. Roadmap Reformasi Birokrasi 9.Register Resiko	Kab. Kapuas Hulu	1.800.000	APBD II
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1RKA SKPD	Kab. Kapuas Hulu	3.000.000	APBD II
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1Perubahan RKA SKPD	Kab. Kapuas Hulu	2.500.000	APBD II
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1DPA SKPD 2RUP	Kab. Kapuas Hulu	2.500.000	APBD II
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1Perubahan DPA SKPD 2Perubahan RUP	Kab. Kapuas Hulu	2.500.000	APBD II
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.LAKIP 2.LPPD 3.LKPJ 4.SAKIP 5.RB 6.SPIP 7.SPBE	Kab. Kapuas Hulu	2.000.000	APBD II
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. PK 2.RAK 3 .MONEVDAL TRIWULAN 4.Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Perangkat Daerah 5.Pengukuran IKP	Kab. Kapuas Hulu	2.000.000	APBD II
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	2.482.478.170	APBD II
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah DAFTAR Gaji dan tunjangan ASN	Kab. Kapuas Hulu	2.269.663.170	APBD II
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	SK PA/KPA/BENDAHARA PENGELUARAN 2.SK PPTK/PPKom 3.SK Pejabat Penatausahaan Keuangan 4.SK Pembantu Bendahara)	Kab. Kapuas Hulu	31.175.000	APBD II
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian Keuangan SKPD	Kab. Kapuas Hulu	171.220.000	APBD II

NO	Program dan Kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Volume	Sumber Dana
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kapuas Hulu	2.500.000	APBD II
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun + lampirannya	Kab. Kapuas Hulu	3.500.000	APBD II
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Tanggapan terhadap HASIL Pemeriksaan APIP/ BPKP/ BPK/ KPK	Kab. Kapuas Hulu	1.920.000	APBD II
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Kapuas Hulu	2.500.000	APBD II
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	31.959.000	APBD II
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1SPK 2 BAST	Kab. Kapuas Hulu	31.959.000	APBD II
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi Umum	Kab. Kapuas Hulu	206.661.375	APBD II
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.Daftar Kebutuhan komponen listrik/ penerangan 2.Laporan Penggunaan komponen Listrik	Kab. Kapuas Hulu	2.060.000	APBD II
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.Daftar kebutuhan alat dan perlengkapan kantor tahun yad 2.Kontrak Pengadaan Barang/Jasa + Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 3. Laporan Pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kapuas Hulu	32.227.375	APBD II
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1Daftar kebutuhan Peralatan rumah tangga 2. Laporan Pelaksanaan Penyediaan Peralatan rumah tangga	Kab. Kapuas Hulu	7.272.000	APBD II
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.Daftar Kebutuhan ATK dan makanan dan minuman; 2. Laporan Pelaksanaan penyediaan logistik	Kab. Kapuas Hulu	23.440.000	APBD II
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Daftar kebutuhan barang cetakan / penggandaan 2 Laporan penyediaan barang cetakan	Kab. Kapuas Hulu	22.875.000	APBD II
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Daftar Rapat SKPD 2 Daftar Perjalanan Dinas	Kab. Kapuas Hulu	114.587.000	APBD II
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Daftar Surat Keluar/ 2 masuk	Kab. Kapuas Hulu	4.200.000	APBD II
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kapuas Hulu	458.486.000	APBD II
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	Kab. Kapuas Hulu	5.939.800	APBD II

NO	Program dan Kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Volume	Sumber Dana
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Daftar penggunaan telepon 2 daftar penggunaan Air ledeng 3 daftar penggunaan daya listrik 4 internet	Kab. Kapuas Hulu	69.036.000	APBD II
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan kantor yang di pelihara	Kab. Kapuas Hulu	4.630.000	APBD II
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan Evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai non ASN	Kab. Kapuas Hulu	378.880.200	APBD II
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kapuas Hulu	17.777.500	APBD II
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kab. Kapuas Hulu	10.624.000	APBD II
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Daftar kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas 2.Laporan pemeliharaan kendaraan dinas	Kab. Kapuas Hulu	7.153.500	APBD II
JUMLAH				7.693.382.295	

KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KAPUAS HULU



MARTHA BANANG, S.H.M.M
NIP. 19651123 199203 2 006

TABEL 4.1

RUMUSAN RANCANGAN AWAL RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024 KABUPATEN KAPUAS HULU

OPD : DINAS SOSISAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KAPUAS HULU

KODE					Program dan Kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Rencana Tahun 2024		
								Target	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	
								1					2	3
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Penanganan dan Pelayanan PMKS	Kab. Kapuas Hulu	100%		189.697.000	APBD II		1	208.666.700
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang difasilitasi	Kab. Kapuas Hulu	37		189.697.000	APBD II		37	208.666.700
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang di Fasilitasi	Kab. Kapuas Hulu	2		23.200.000	APBD II		23	25.520.000
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kab/Kota	Kab. Kapuas Hulu	23		166.497.000	APBD II		23	183.146.700
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang dilakukan pemulangan	Kab. Kapuas Hulu	100%		5.229.250	APBD II		1	5.752.175
1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kab. Kapuas Hulu	2		5.229.250	APBD II		4	5.752.175

1	06	03	2.01	01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kab. Kapuas Hulu	2	5.229.250	APBD II	4	5.752.175
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dapat diberikan pelayanan	Kab. Kapuas Hulu	80%	43.388.000	APBD II	0,8	47.726.800
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang direhabilitasi	Kab. Kapuas Hulu	25	43.388.000	APBD II	25	47.726.800
1	6	4	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kab/Kota	Kab. Kapuas Hulu	5	3.388.000	APBD II	6	3.726.800
1	6	4	2.02		13 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kab/Kota	Kab. Kapuas Hulu	10	40.000.000	APBD II	11	44.000.000
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga Penerima Manfaat	Kab. Kapuas Hulu	100	4.044.584.000	APBD II	10,682	4.449.042.400
1	06	05	2.02		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin	Kab. Kapuas Hulu	2	4.044.584.000	APBD II	2	4.449.042.400
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin	Kab. Kapuas Hulu	4	3.967.247.000	APBD II	2	4.363.971.700
1	6	5	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Kapuas Hulu	2	77.337.000	APBD II	37,6	85.070.700

1	6	6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban bencana alam/ sosial yang dapat diberikan pelayanan	Kab. Kapuas Hulu	100	85.663.000	APBD II		0,8	94.229.300
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Korban Bencana Alam dan Sosial yang ditangani	Kab. Kapuas Hulu	10	19.363.000	APBD II		2	21.299.300
1	6	6	2,01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah orang perhari	Kab. Kapuas Hulu	10	19.363.000	APBD II		70	21.299.300
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Taruna Siaga Bencana difasilitasi	Kab. Kapuas Hulu	35	66.300.000	APBD II		35	72.930.000
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Taruna Siaga Bencana difasilitasi	Kab. Kapuas Hulu	35	66.300.000	APBD II		35	72.930.000
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota yang dilakukan pemeliharaan	Kab. Kapuas Hulu	100	28.680.000	APBD II		1	31.548.000
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	jumlah Taman Makam Pahlawan yang dilakukan pemeliharaan	Kab. Kapuas Hulu	1	28.680.000	APBD II		1	31.548.000
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dilakukan pemeliharaan	Kab. Kapuas Hulu	2	28.680.000	APBD II		2	31.548.000
2	08	02			PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	persentase Partisipasi perempuan dilembaga pemerintah	Kab. Kapuas Hulu	2,51	8.479.000	APBD II			9.326.900

2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang difasilitasi	Kab. Kapuas Hulu	2	8.479.000	APBD II		9.326.900
2	08	04	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang difasilitasi	Kab. Kapuas Hulu	2	8.479.000	APBD II	120	9.326.900
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Perempuan yang mendapat pelatihan	Kab. Kapuas Hulu	100	21.320.500	APBD II		23.452.550
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang ikut pelatihan	Kab. Kapuas Hulu	1	21.320.500	APBD II		23.452.550
2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang ikut pelatihan	Kab. Kapuas Hulu	1	21.320.500	APBD II	120	23.452.550
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Nilai capaian Kabupaten Layak Anak (pratama, madya, nindya, utama, KLA)	Kab. Kapuas Hulu	200	52.679.500	APBD II	300	57.947.450
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu		52.679.500	APBD II	1	57.947.450
2	08	06	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat(PATBM)	Kab. Kapuas Hulu	1	27.735.500	APBD II	1	30.509.050
2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen forum Anak Daerah FAD)	Kab. Kapuas Hulu	1	24.944.000	APBD II	100	27.438.400

X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah dari Inkab	Kab. Kapuas Hulu	60-70	3.213.662.045	APBD II		70-80	3.535.028.250
X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	26	16.300.000	APBD II		26	17.930.000
X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1RENSTRA 2.RENJA 3.Perubahan RENJA 4. IKU 5. IKI 6. Peta Proses Bisnis 7. SOP 8. Roadmap Reformasi Birokrasi 9.Register Resiko	Kab. Kapuas Hulu	8	1.800.000	APBD II		8	1.980.000
X	XX	1	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1RKA SKPD	Kab. Kapuas Hulu	1	3.000.000	APBD II		1	3.300.000
X	XX	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1Perubahan RKA SKPD	Kab. Kapuas Hulu	1	2.500.000	APBD II		1	2.750.000
X	XX	1	2,01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1DPA SKPD 2RUP	Kab. Kapuas Hulu	2	2.500.000	APBD II		2	2.750.000
X	XX	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1Perubahan DPA SKPD 2Perubahan RUP	Kab. Kapuas Hulu	2	2.500.000	APBD II		2	2.750.000
X	XX	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.LAKIP 2.LPPD 3.LKPJ 4.SAKIP 5.RB 6.SPIP 7.SPBE	Kab. Kapuas Hulu	4	2.000.000	APBD II		4	2.200.000
X	XX	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. PK 2.RAK 3 .MONEVDAL TRIWULAN 4.Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Perangkat Daerah 5.Pengukuran IKP	Kab. Kapuas Hulu	8	2.000.000	APBD II		8	2.200.000

X	XX	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	56	2.482.478.170	APBD II	56	2.730.725.987
X	XX	1	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah DAFTAR Gaji dan tunjangan ASN	Kab. Kapuas Hulu	14	2.269.663.170	APBD II	14	2.496.629.487
X	XX	1	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	SK PA/KPA/BENDAHARA PENGELUARAN 2.SK PPTK/PPKom 3.SK Pejabat Penatausahaan Keuangan 4.SK Pembantu Bendahara)	Kab. Kapuas Hulu	4	31.175.000	APBD II	4	34.292.500
X	XX	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian Keuangan SKPD	Kab. Kapuas Hulu	6	171.220.000	APBD II	6	188.342.000
X	XX	1	2,02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kapuas Hulu	7	2.500.000	APBD II	7	2.750.000
X	XX	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun + lampirannya	Kab. Kapuas Hulu	1	3.500.000	APBD II	1	3.850.000
X	XX	01	2,02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Tanggapan terhadap HASIL Pemeriksaan APIP/ BPKP/ BPK/ KPK	Kab. Kapuas Hulu	1	1.920.000	APBD II	1	2.112.000
X	XX	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Kapuas Hulu	5	2.500.000	APBD II	5	2.750.000
X	XX	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	17	31.959.000	APBD II	17	35.154.900

X	XX	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1SPK 2 BAST	Kab. Kapuas Hulu	1	31.959.000	APBD II	1	35.154.900
X	XX	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi Umum	Kab. Kapuas Hulu	19	206.661.375	APBD II	21	227.327.513
X	XX	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.Daftar Kebutuhan komponen listrik/ penerangan 2.Laporan Penggunaan komponen Listrik	Kab. Kapuas Hulu	2	2.060.000	APBD II	2	2.266.000
X	XX	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.Daftar kebutuhan alat dan perlengkapan kantor tahun yad 2.Kontrak Pengadaan Barang/Jasa + Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 3. Laporan Pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kapuas Hulu	3	32.227.375	APBD II	3	35.450.113
X	XX	1	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1Daftar kebutuhan Peralatan rumah tangga 2. Laporan Pelaksanaan Penyediaan Peralatan rumah tangga	Kab. Kapuas Hulu	1	7.272.000	APBD II	1	7.999.200
X	XX	1	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.Daftar Kebutuhan ATK dan makanan dan minuman; 2. Laporan Pelaksanaan penyediaan logistik	Kab. Kapuas Hulu	0	23.440.000	APBD II	2	25.784.000
X	XX	1	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Daftar kebutuhan barang cetakan / penggandaan 2 Laporan penyediaan barang cetakan	Kab. Kapuas Hulu	2	22.875.000	APBD II	2	25.162.500
X	XX	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Daftar Rapat SKPD 2 Daftar Perjalanan Dinas	Kab. Kapuas Hulu	2	114.587.000	APBD II	2	126.045.700
X	XX	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Daftar Surat Keluar/ 2 masuk	Kab. Kapuas Hulu	2	4.200.000	APBD II	2	4.620.000

X	XX	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kapuas Hulu	5		458.486.000	APBD II		5	504.334.600
X	XX	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	Kab. Kapuas Hulu			5.939.800	APBD II			6.533.780
X	XX	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Daftar penggunaan telepon 2 daftar penggunaan Air ledeng 3 daftar penggunaan daya listrik 4 internet	Kab. Kapuas Hulu	4		69.036.000	APBD II		4	75.939.600
X	XX	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan kantor yang di pelihara	Kab. Kapuas Hulu			4.630.000	APBD II			5.093.000
X	XX	1	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan Evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai non ASN	Kab. Kapuas Hulu	1		378.880.200	APBD II		1	416.768.220
X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kapuas Hulu	4		17.777.500	APBD II		4	19.555.250
X	XX	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kab. Kapuas Hulu			10.624.000	APBD II			11.686.400

X	XX	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Daftar kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas 2.Laporan pemeliharaan kendaraan dinas	Kab. Kapuas Hulu	1	7.153.500	APBD II	1	7.868.850
JUMLAH TOTAL									7.693.382.295			8.453.393.625



KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KAPUAS HULU

MARTHA BANANG, S.H.M.M
NIP. 19651123 199203 2 006